BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan serta buku dan karya tulis yang berkaitan dengan pasar modal, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan jual beli saham secara *online* di pasar modal di atur dalam undang-undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang masih secara umum mengatur transaksi jual beli secara *online* di Indonesia dan untuk pasar modal dalam pelaksanaannya di atur dalam undang-undang No 8 tahun 1995 tentang pasar modal membentuk sebuah badan yaitu badan pengawas pasar modal (Bapepam) yang memiliki tugas dan fungsi yang telah di sebutkan di dalam Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal yang selanjutnya disebut Bapepam” dan setelah di bentuknya sebuah undang-undang baru yaitu undang-undang No 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga Otoritas Jasa Keuangan memiliki tugas dan fungsi sebagai pada pasal 4 yaitu terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.
2. Didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal telah diatur mengenai keterbukaan informasi yang harus diberikan kepada investor, diaturnya tanggung jawab perusahaan efek, perbuatan yang dilarang yang dapat menimbulkan kerugian terhadap investor, pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku kegiatan pasar modal dalam

menjalankan kegiatannya, adanya sanksi yang diberikan kepada pelaku pasar modal yang melanggar baik berupa sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana, dan diaturnya keberadaan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam-LK) sebagai Badan pengawas setiap kegiatan yang berhubungan dengan Pasar Modal yang saat ini telah digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap investor juga terdapat didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pelaksananya yaitu PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Dalam kegiatan transaksi jual beli saham secara *online* dikategorikan kedalam transaksi elektronik yang diatur dalam Undang- Undang ini. Sehingga setiap kegiatan transaksi jual beli saham secara *online* yang diselenggarakan oleh perusahaan efek harus berpedoman kepada Undang-Undang ini. Kemudian lahirnya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menjadi langkah baru dalam pengawasan dibidang pasar modal. Aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada investor dalam Undang-Undang ini adalah upaya pencegahan atau preventif dan penindakan atau represif yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan.

B. Saran

Dilakukan pembentukan serta pembaharuan dalam peraturan perundang- undangan yang berkaitan dengan Pasar Modal. Otoritas Jasa Keuangan diharapkan berperan aktif dalam melakukan pengawasan dalam kegiatan di bidang pasar modal tanpa harus menunggu adanya laporan atau aduan dari pihak yang dirugikan. Karena perlindungan hukum yang diberikan kepada investor berkaitan dengan baiknya penegakan hukum di bidang Pasar Modal. karena banyak investor dan calon yang memiliki pengetahuan yang minim mengenai

pasar modal Dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan efek yang menggunakan *Online Trading System*. Serta penelitian lebih lanjut terhadap Tanggung jawab Perusahaan Efek melaksanakan transaksi saham dengan menggunakan *Online Trading System*.